

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2022

DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

Jalan Siliwangi Nomor 355- 357 Semarang 50146 Telepon 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile. 7607697 Laman : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu – isu Strategis.....	3
1.2.1 Aspek Strategis Organisasi	3
1.2.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	4
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	7
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.3.2 Peta Proses Bisnis	10
1.3.3 Struktur Organisasi	11
1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	14
1.5 Sistematika Penulisan	17
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022	18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	20
2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja	20
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator	20
2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	22
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	50
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	52
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	54
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	55
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	56
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD.....	57
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	58
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	61
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	62
3.2 Realisasi Anggaran	77
3.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	83
3.3 Inovasi.....	84
3.4 Penghargaan	85
BAB 4 PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Rekomendasi	89
LAMPIRAN	91
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	91
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja.....	14
Tabel 1. 2 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2022	15
Tabel 1. 3 Dukungan Anggaran Tahun 2022	17
Tabel 1. 4 Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022.....	18
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	21
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	22
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	22
Tabel 2. 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 2. 5 Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	24
Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2022 Perubahan Pada Urusan Perhubungan	25
Tabel 2. 7 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022 Perubahan	51
Tabel 2. 8 Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2022 Perubahan	52
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	54
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022	55
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	56
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD.....	57
Tabel 3. 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	58
Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Tujuan Ke-1).....	63
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Tujuan Ke-2).....	74
Tabel 3. 9 Kebijakan Yang Diterbitkan Tahun 2022.....	77
Tabel 3. 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	78
Tabel 3. 11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	10
Gambar 1. 6 Peta Relasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	11
Gambar 1. 7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	12
Gambar 1. 8 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	12
Gambar 1. 9 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	13
Gambar 1. 10 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	13
Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang).....	14
Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang).....	15
Gambar 3. 1 Peresmian perpanjangan rute Trans Jateng Terminal Bahurekso – RTH Weleri oleh Bupati Kendal Tahun 2022	67
Gambar 3. 2 Pembangunan Terminal Kutoarjo (tahap 2)	67
Gambar 3. 3 Penyediaan Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Ruas Jatibarang - Ketanggungan.....	70
Gambar 3. 4 Pemasangan Perlengkapan Jalan (Guard Rail) Kabupaten Banyumas	70
Gambar 3. 5 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	71
Gambar 3. 6 LPJU Terpasang di Lintas Penyebrangan Sungai Kendal - Batang Ds. Jatipurwo (Kendal) dan Ds. Yosorejo (Batang)	71
Gambar 3. 7 Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS) di Perlintasan Sebidang Kereta Api JPL 9 Kabupaten Sukoharjo	72
Gambar 3. 8 Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi	73
Gambar 3. 9 Grafik Penggunaan Sumber Daya Keuangan	83
Gambar 3. 10 Aplikasi Si-Anteng	85
Gambar 3. 11 Piagam Penghargaan Pembina Terbaik II.....	85
Gambar 3. 12 Piagam Penghargaan Railways Safety Awards 2022.....	86

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 22 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan capaian pada TA. 2022 yaitu :

Capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah capaian sebesar 110,74 % masuk katagori **sangat baik**. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2021 yang sebesar 102,12 %. Tujuan 1 (satu) ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 115.1655 % dengan realisasi 54.98 % dari target 47.74 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Penerbangan dengan total 13 (tiga belas) Indikator.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 123.0088 % dengan realisasi 29.19 % dari target 23.73 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan total 10 (sepuluh) Indikator.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46.67 % dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan total 1 (satu) Indikator.

Capaian tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 101.5924 % atau realisasi nilai reformasi birokrasi 79.75 dari target 78.5. Dalam tujuan 2 (dua) ini didukung oleh 2 (dua) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2022 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3.23 dan nilai hasil IKM 80.75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya nilai IKM 3.19 dan nilai hasil IKM 79.75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 78.18 meningkat dari tahun 2021 75.28, termasuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik) dengan interpretasi sangat baik, akuntable, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 diharapkan dapat:

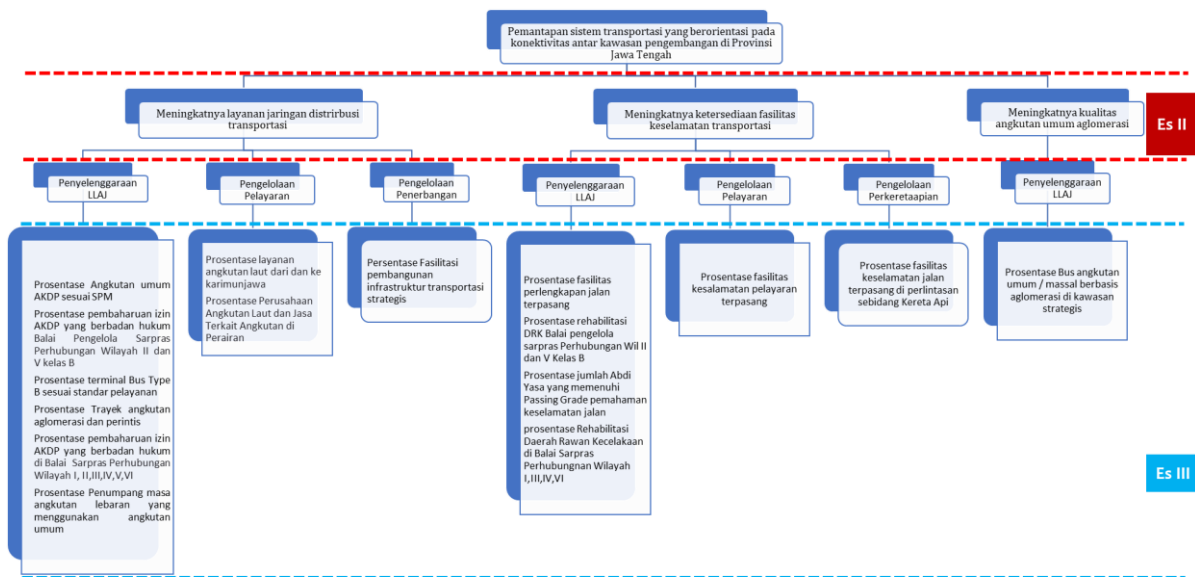
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Latar Belakang

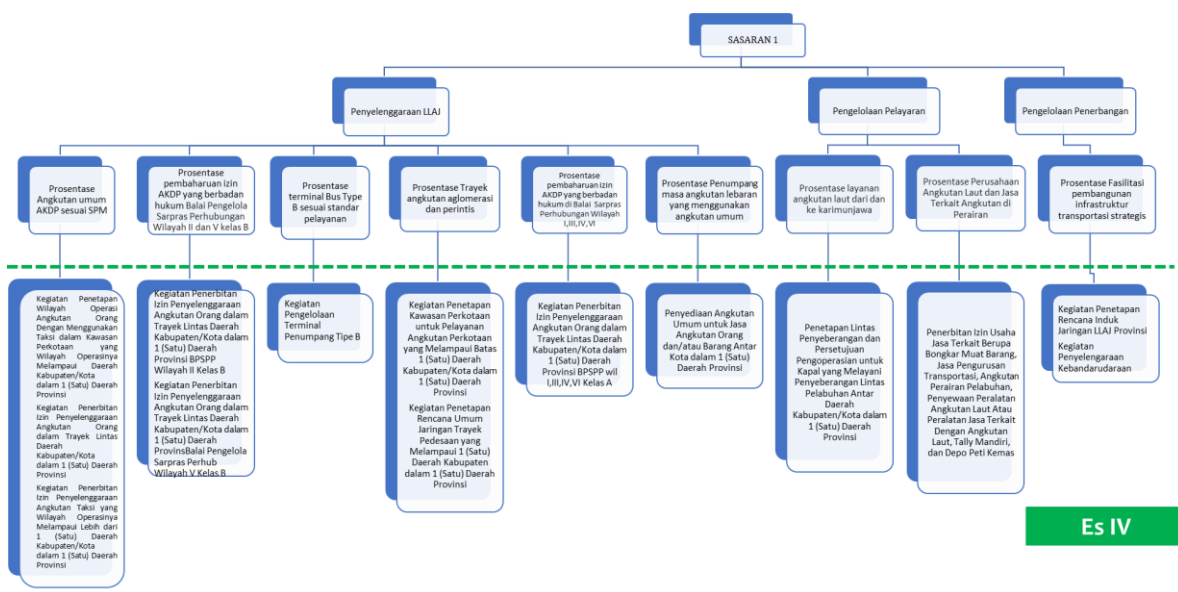
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi Kepala Daerah "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi. Selain itu terdapat program kerja

Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 "Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi".

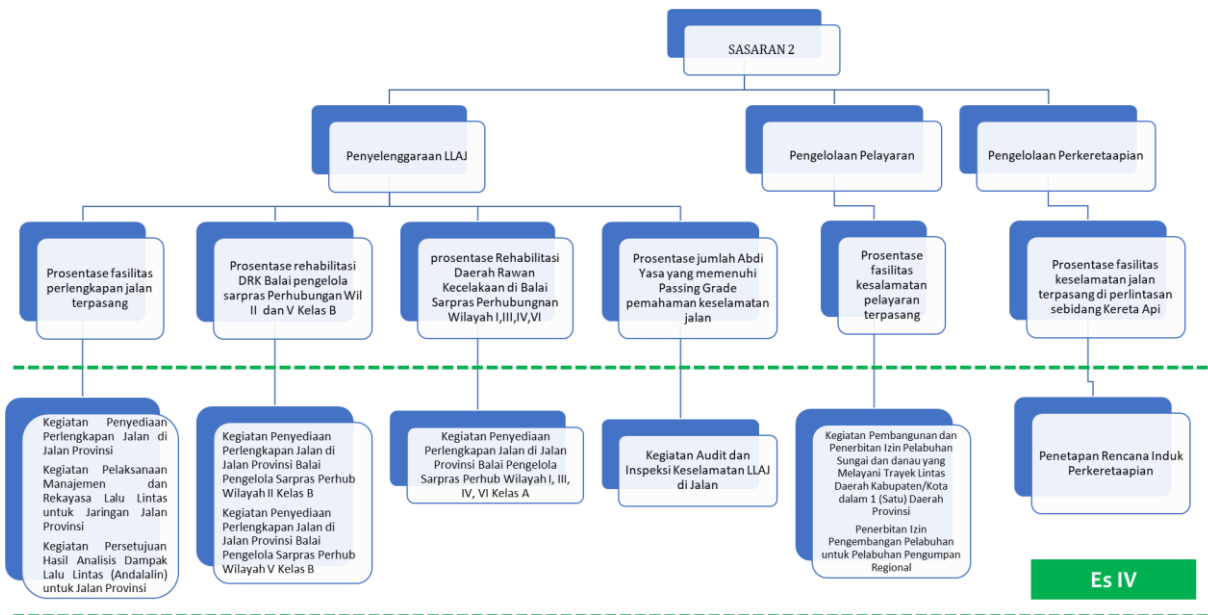
Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon kinerja adalah sebagai berikut



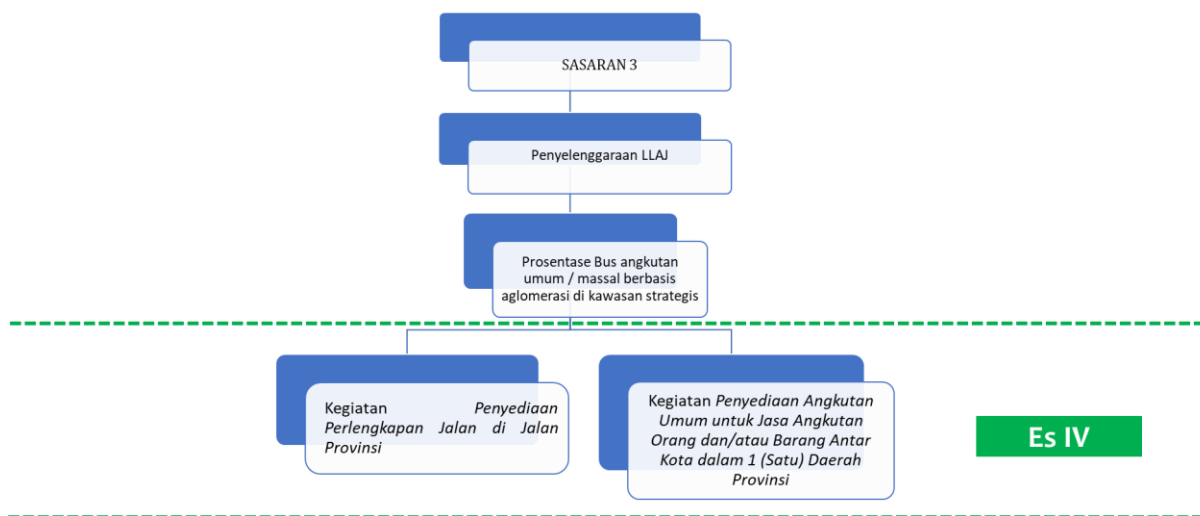
Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan



Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan



Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan



Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan

1.2 Isu – isu Strategis

1.2.1 Aspek Strategis Organisasi

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya tersebut melalui Tujuan Organisasi dengan memantapkan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau serta pemenuhan Infrastruktur perhubungan strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah, diantaranya terkait dengan Pengembangan wilayah di Jawa Tengah

dikaitkan dengan adanya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta Kawasan Industri Terpadu sesuai dengan Misi Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 serta program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Tujuan organisasi tersebut dijabarkan dalam Sasaran organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran tersebut adalah Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi, Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan Meningkatkan kualitas angkutan umum aglomerasi.

1.2.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, isu-isu strategis memuat review faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah Renstra K/L, OPD Provinsi/Kabupaten/Kota; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; implikasi KLHS bagi pelayanan OPD. Isu-isu Strategis sebagai berikut

1. Konektivitas

- a. Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun;
- b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

2. Simpul

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang

- b. Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan perhubungan udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah
 - c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan pengumpan regional dan pelayanan dermaga penyeberangan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Jawa Tengah
3. Ruang Pergerakan
- a. Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan
 - b. Belum seimbangnya pertumbuhan antara jaringan kereta api dengan permintaan perjalanan dengan menggunakan moda kereta api
4. Keselamatan
- a. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA
 - b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan pelayaran dan Udara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 yang juga berkaitan dengan pelayanan OPD Dinas Perhubungan yaitu :

1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun karena terjadinya pandemi Covid-19 perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 terjadi kontraksi, termasuk pada sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, perdagangan dan jasa), kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh positif di tahun 2020 sampai triwulan 3. Beberapa kondisi yang dihadapi kedepan pada Sektor Perdagangan dan Jasa sebagai berikut :

Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah perdagangan dan jasa, yang trennya dari tahun ke tahun mulai meningkat. Meskipun meningkat,

persoalan yang dihadapi di sektor Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Jasa transportasi sebagai pendukung sector ekonomi yang lain menjadi salah satu penyumbang ekonomi sehingga terkait kebijakan kenaikan harga BBM pada Tahun 2022 menjadi factor untuk menambah pengeluaran biaya transportasi bagi masyarakat. Guna melakukan pengendalian inflasi Daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nomor 900/19.830 tentang Penerimaan bantuan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Transportasi Angkutan Umum Orang yang Terdampak inflasi akibat Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Di Jawa Tengah. Bantuan diberikan kepada pekerja transportasi angkutan umum orang sebanyak 1.131 orang awak / kru angkutan umum AKDP, AJDP dan Taksi serta 6.554 pengemudi (driver) angkutan online atau ojol masing masing sejumlah Rp. 600.000,-.

2. kesenjangan wilayah

Dalam isu strategis Daerah ke-6 adalah kesenjangan wilayah yaitu Meskipun ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah semakin menurun, namun masih perlu ditangani kesenjangan akses antara desa-kota maupun antara kota-kota (kawasan aglomerasi perkotaan) dan antar wilayah utamanya aksesibilitas – konektivitas wilayah Pantura – Pansela dan wilayah tengah Jawa Tengah, integrasi antar moda transportasi serta distribusi barang – jasa yang memadai. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.

Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas utamanya untuk menunjang kegiatan perekonomian (pariwisata dan industri) yaitu penyediaan angkutan umum massal melalui lanjutan operasional 6 (enam) koridor Trans Jateng (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Solo-Sumberlawang (via Sangiran), Kutoarjo-Borobudur dan Koridor Semarang-Gubug Via Godong. Selain itu pada tahun 2022 juga dilakukan Dukungan/Fasilitasi terhadap rencana pengembangan infrastruktur strategis

berupa pembangunan lanjutan Terminal Kutoarjo Kabupaten Purworejo dalam mendukung pengembangan wilayah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah fasilitasi reaktivasi jalur KA rute Semarang – Demak – Kudus – Rembang – Tuban (refocusing).

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Tugas dari anggota susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

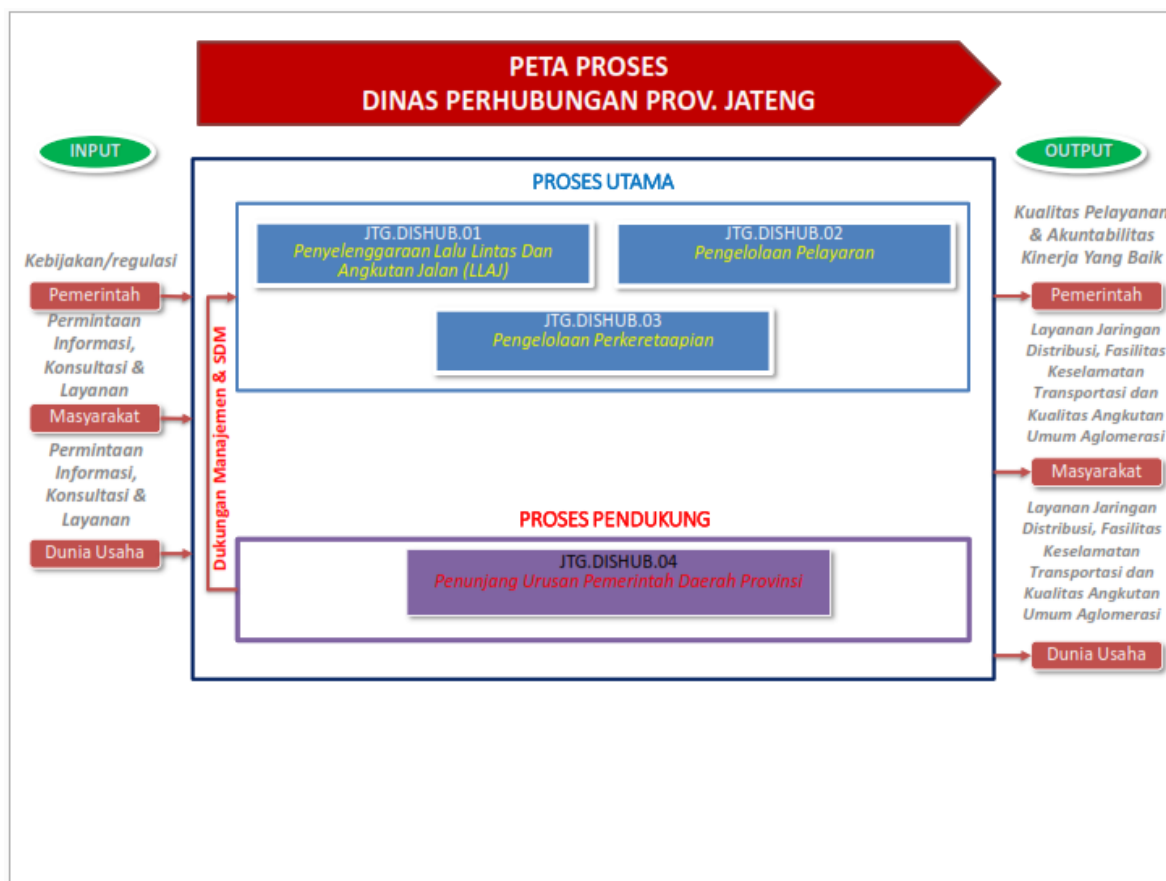
- laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
 - g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
5. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

- kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, Dan Perkeretaapian.
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan transportasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian.
6. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
7. Balai Perhubungan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah

- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

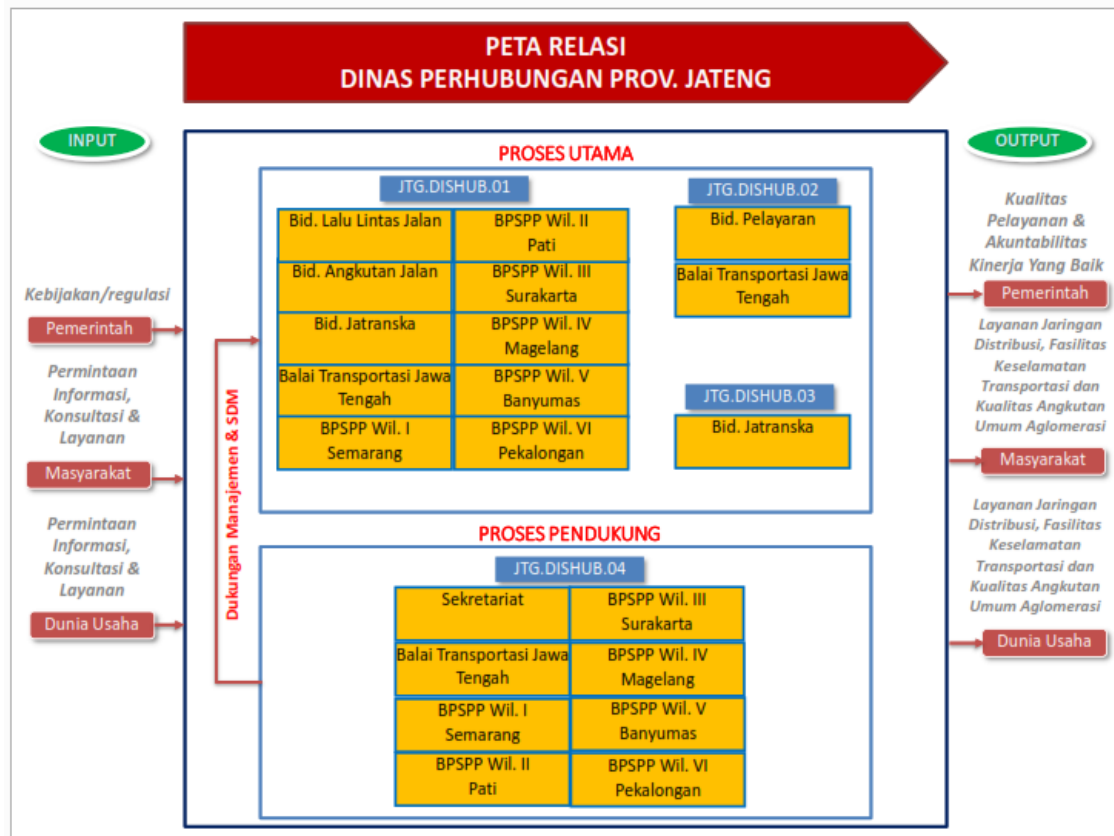
1.3.2 Peta Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui peta proses bisnis dibawah ini :



Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan peta proses bisnis tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dibagi kedalam beberapa unit kerja yang mendukung kinerja baik pada proses utama maupun proses pendukung Dinas. Adapun peta relasi dari proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah seperti pada gambar berikut :

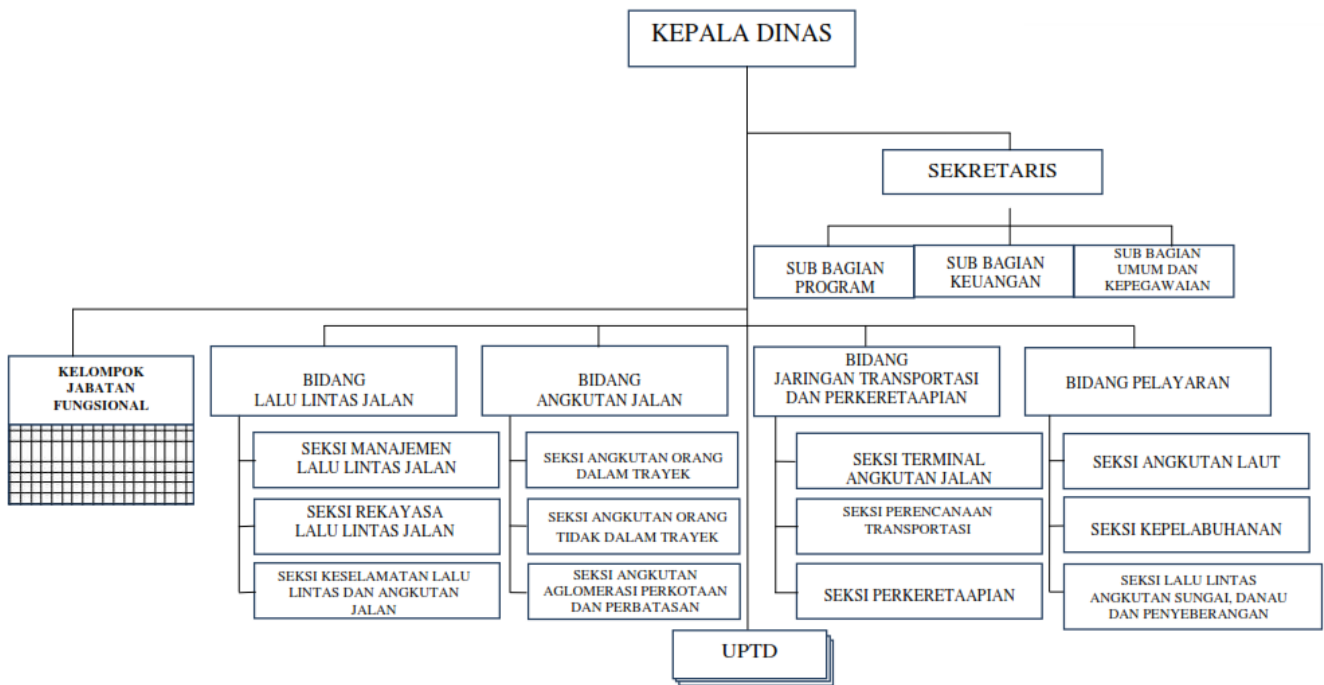


Gambar 1. 6 Peta Relasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

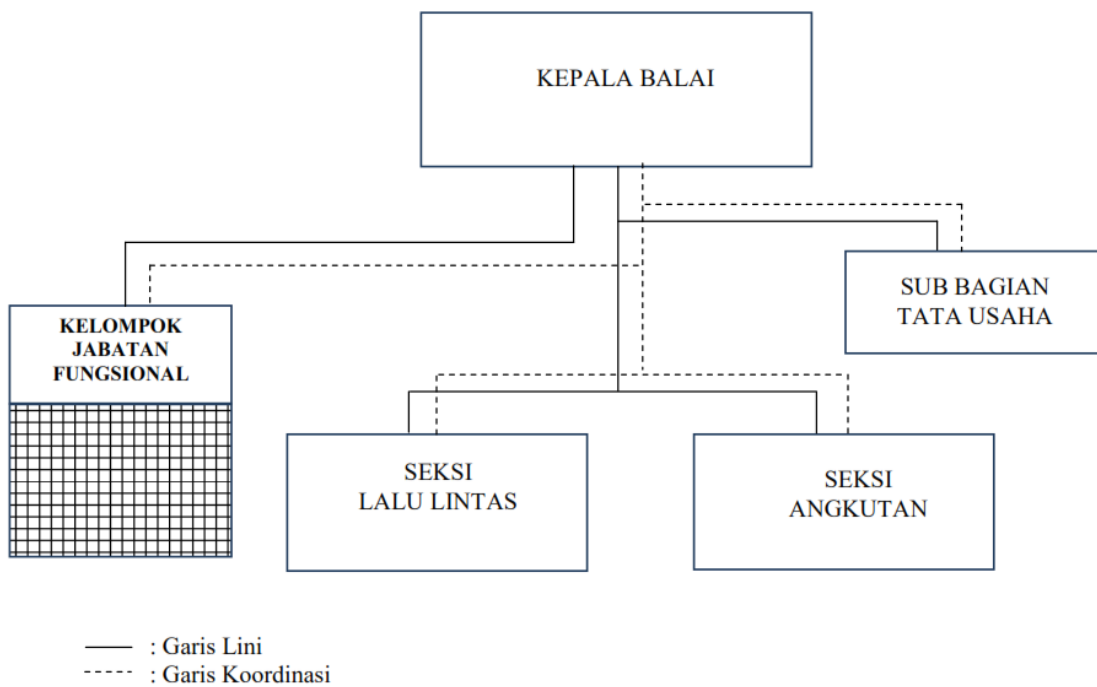
1.3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

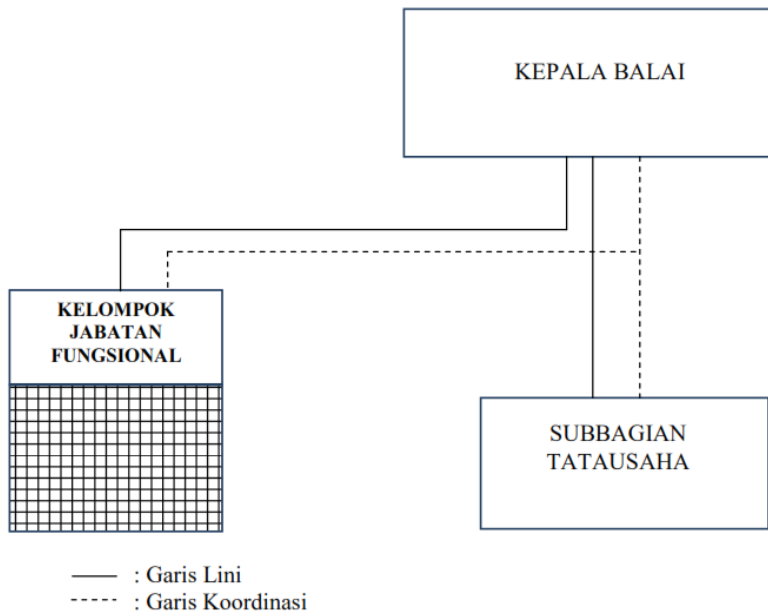
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, UPT Dinas sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah (4 BPSPP Kelas A dan 2 BPSPP Kelas B), dan Balai Transportasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana gambar :



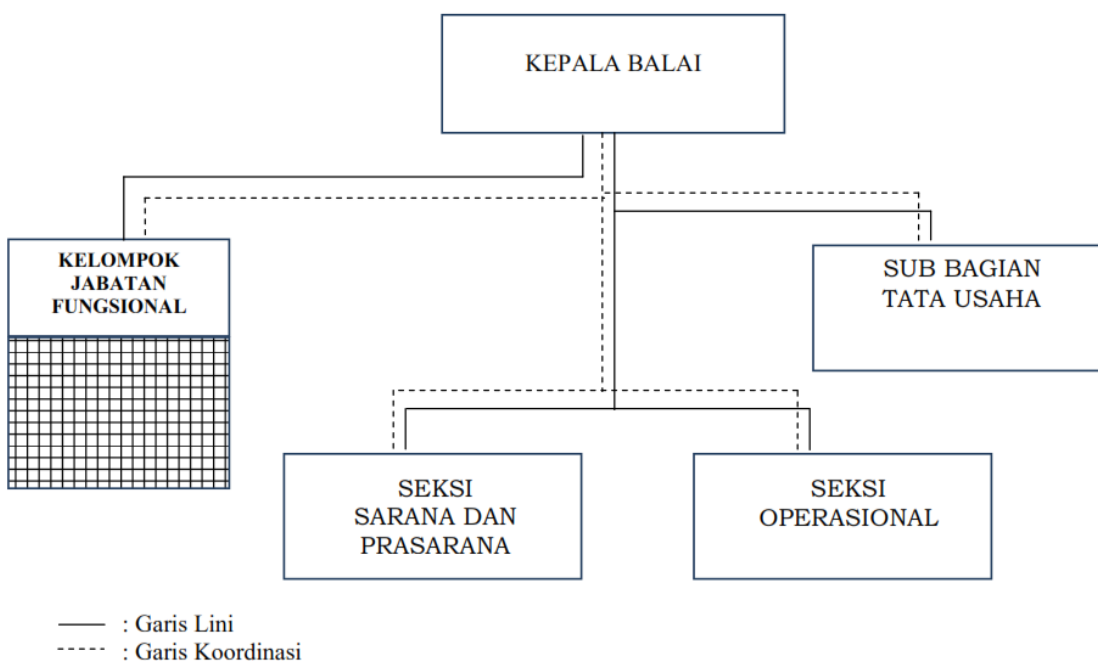
Gambar 1. 7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1. 8 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1. 9 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



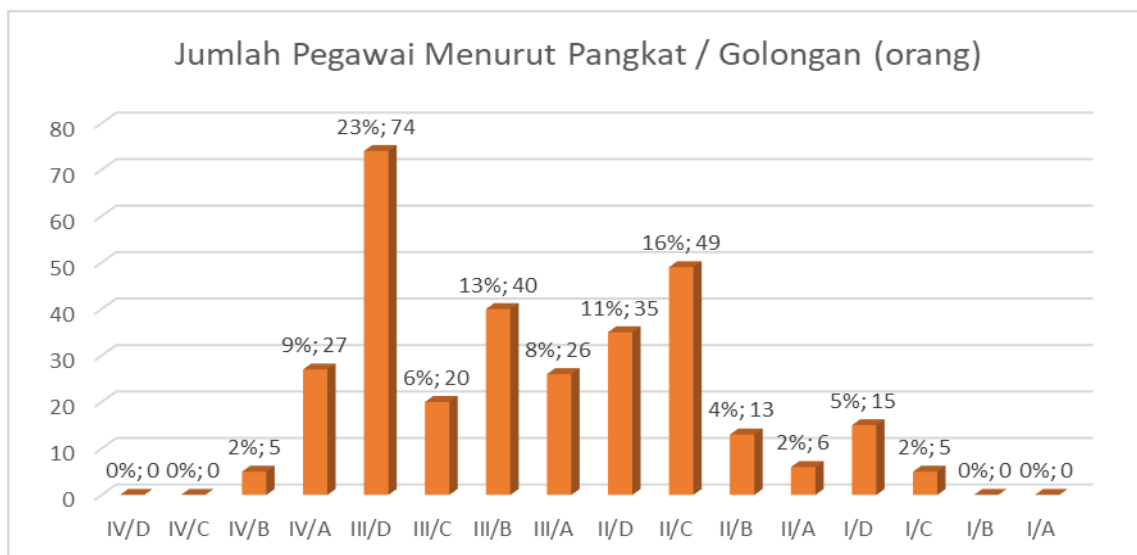
Gambar 1. 10 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

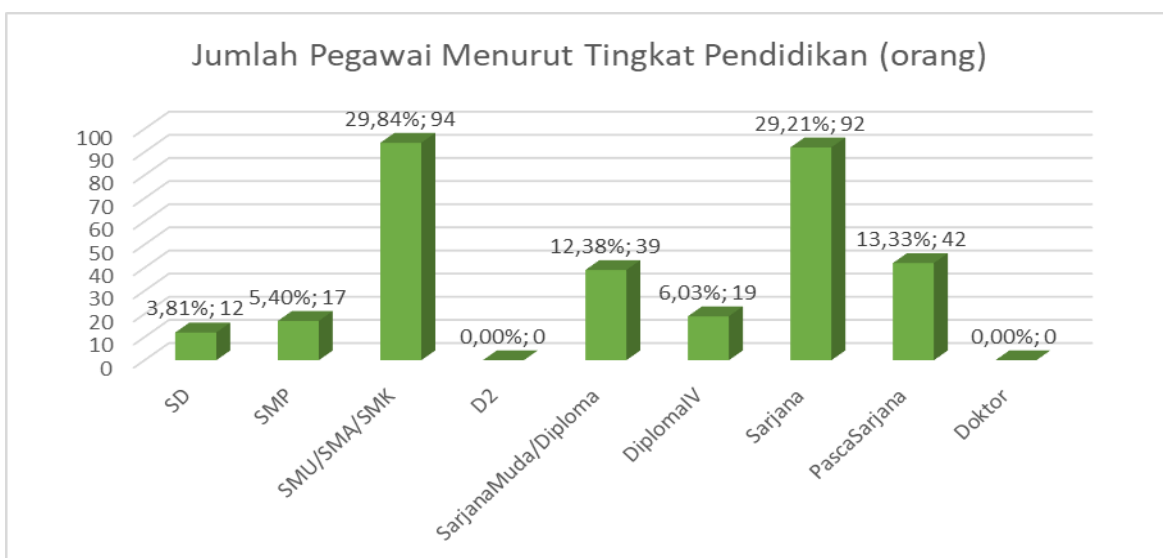
Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Tenaga Teknis (Pegawai Tidak Tetap) yang total berjumlah 589 terdiri dari 315 ASN (46,52%) dan 274 PTT (53,48%). Data Pegawai (ASN) sebagaimana tabel :

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	47
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	16
4	Bidang Angkutan Jalan	12
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	12
6	Bidang Pelayaran	9
7	BPSPP Wilayah I	33
8	BPSPP Wilayah II	16
9	BPSPP Wilayah III	70
10	BPSPP Wilayah IV	20
11	BPSPP Wilayah V	21
12	BPSPP Wilayah VI	24
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	21
	Jumlah	302



Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang)



Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)

Dari data tersebut diketahui bahwa menurut Pangkat / Golongan, ASN yang paling banyak yaitu berpangkat/golongan III/d dengan jumlah 74 (23%) orang dan menurut tingkat pendidikan, ASN yang paling banyak berpendidikan SMU/SMA/SMK dengan 94 Orang (29,84%) dan berpendidikan Sarjana dengan 92 orang (29,21%).

Untuk Sumber Daya Aset Dinas Perhubungan sebagaimana tabel :

Tabel 1. 2 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2022

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2022	
			Jml.	Harga
1	2	3	4	5
1	1.3.1.01	TANAH	162	193,819,625,633
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	23	2,004,191,741
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	133	28,733,634,421
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	167	5,095,533,200
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2,097	8,434,183,603
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	290	2,387,394,176
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	6	8,150,000
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	4	163,343,000
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	18	31,204,725
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	565	5,189,294,129
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2022	
			Jml.	Harga
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	388	23,001,302,858
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	6	8,601,440
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	550	121,797,193,235
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	2	535,357,815
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	887,940,946
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	34	31,673,474,149
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	15	15,158,134,030
27	1.3.4.03	INSTALASI	605	17,525,803,035
28	1.3.4.04	JARINGAN	1,569	30,546,250,076
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	136	26,090,000
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	22	387,710,000
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	42	39,465,000
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20	2,938,774,288
			6,858	490,392,651,500

Sumber : Dinas Perhubungan

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Dukungan Anggaran Tahun 2022

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	22.321.786.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.321.786.000
4.1.2	Retribusi Daerah	3.521.786.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18.800.000.000
5	BELANJA DAERAH	170.418.443.000
5.1	BELANJA OPERASI	162.118.621.000
5.1.1	Belanja Pegawai	41.047.080.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.071.541.000
5.2	BELANJA MODAL	8.299.822.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.017.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.282.822.000
	Surplus/(Defisit)	(148.096.657.000)

Dukung Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar Rp. 170.418.443.000,- terdiri dari Rp. 162.118.621.000,- Belanja Operasi berupa Gaji 305 Pegawai Rp. 41.047.080.000,- dan belanja barang Jasa Rp. 121.071.541.000 serta Belanja Modal sebesar Rp. 8.299.822.000,-.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022

Rangkuman Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 4 Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Pada aspek pemanfaatan Perencanaan Kinerja Tahunan, monitoring rencana aksi atas kinerja perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	Realisasi capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi yang telah disusun telah di gunakan sebagai acuan dalam evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara periodik triwulan di system e-controlling, realisasi kinerja yang menunjukkan deviasi negative dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja melalui Rapat Pengendalian Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil desk evaluasi Kinerja Triwulan I dan II - Undangan Rapat Koordinasi Pengendalian Intern SKPD - Notulen Rapat Pengendalian disertai keterangan kendala atau hambatan dan permasalahan kegiatan yang perlu ditingkatkan kinerjanya - Nota Dinas Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2021
2	Membuat mekanisme yang memadai atau terstruktur mengenai SOP pengumpulan data kinerja, mencatat dan mensupervisi kinerja yang didukung teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun SOP pada Sub Bagian Program nomor 067/21/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program dengan ruang lingkup diantaranya SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2. Telah disusun aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (Pake-Siska). Aplikasi ini digunakan sebagai pengumpulan data kinerja dan alat untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan secara actual, cepat dan mudah diakses dalam rangka pencapaian akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Peraturan Kepala Dinas Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah - Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tentang Sistem Informasi 'PAKE-SISKA' Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan - User manual book penggunaan aplikasi (https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/)
3	Memfaatkan informasi kinerja dalam LKjIP untuk perbaikan penyusunan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja	<p>Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pada LKjIP 2021 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi atau peraturan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas posko terpadu monitoring kegiatan pra Mudik dan peniadaan mudik lebaran 1442 H / 2021serta kegiatan penyekatan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	organisasi dan penilaian kinerja unit kerja.	<p>melalui SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 H serta SE nomor 22 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic corona virus disease 2019 (Covid 19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Tahun 2021.</p> <p>2. KMC kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa usia kapal relatif tua (17 tahun).</p>	<p>kedatangan pemudik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas posko lebaran Tahun 2022 - Surat Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah hal Permohonan Tindak Lanjut Hibah KMC Kartini 1 ke UNIMAR AMNI Semarang
4	Pemantauan mengenai perkembangan/ kemajuan pencapaian kinerja SKPD agar mencantumkan masalah/ hambatan dan rekomendasi alternative perbaikan manajemen kinerja yang memberikan rekomendasi alternatif perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.	Terhadap kendala atau permasalahan yang dihadapi unit kerja terkait kemajuan kinerja, telah dipersyaratkan mengisi permasalahan dan upaya penyelesaian khusus kegiatan yang mengalami deviasi negative diatas 5%	- Laporan Kinerja Bulan Juli
5	Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas external (BPK RI) dan pengawas Internal (APIP) yang belum selesai di tindaklanjuti.	Pembahasan perkembangan pemberian tali asih pengadaan tanah Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang	- Notulen Pembahasan perkembangan pemberian tali asih pengadaan tanah Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah “Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah”, dengan indikator tujuan prosentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada akhir tahun 2023 mencapai 59,50%. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi, dengan indikator prosentase layanan jaringan distribusi transportasi pada tahun 2023 sebesar 60,38%
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi pada tahun 2023 sebesar 51,45%
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal pada tahun 2023 sebesar 66,67%

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah		Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	25,59	34,45	42,37	49,87	59,5	59,5
		Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	34,75	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas	prosentase pemenuhan fasilitas	8,69	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45

		keselamatan transportasi	keselamatan transportasi						
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	33,33	40	46,67	53,33	66,67	66,67

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Reformasi Birokrasi	65,13	67,73	70,33	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip	70,25	70,45	70,65	70,85	71,00	71,00

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	-	72,93	75,50	75,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip	70,25	70,45	70,65	70,85	71,00	71,00

2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan

program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel :

Tabel 2. 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah. 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Fasilitas Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan 4. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di jalan, perlintasan KA, Pelabuhan dan Dermaga 2. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan transportasi 3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi. 2. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menerapkan system Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target perubahan renstra :

Tabel 2. 5 Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2022
1	Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah		Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	39,38
		Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,74
		Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,73
		Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip	Angka	77,51

Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2022 Perubahan Pada Urusan Perhubungan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	39.18	112,692,117,000	DISHUB
Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	23.49	10,807,764,000	DISHUB
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	24.48	2,723,320,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi (Perlengkapan Jalan)	2,274	1,483,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			<i>1,483,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu (Buah)</i>	<i>200</i>	<i>215,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Buah)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan APILL (Unit)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Unit)</i>	<i>2</i>	<i>58,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ITS (Paket)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Unit)</i>	<i>60</i>	<i>1,210,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengadaan Aplikator Marka (Unit)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			<i>1,115,320,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Kali)	<i>12</i>	<i>330,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi)	<i>20</i>	<i>739,000,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (Kab/Kota)	<i>18</i>	<i>46,320,000</i>	Bidang Lalu Lintas Jalan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>	<i>Jumlah Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok)</i>	6	330,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ (Kegiatan)</i>	6	739,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	<i>Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota)</i>	18	46,320,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</i>	<i>Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi (Dok)</i>	95	125,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin</i>	<i>Jumlah penilaian dan pengawasan Andalalin di Ruas Jalan Provinsi (Dok)</i>	22	125,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	8.67	235,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>			235,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang)</i>	252	200,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum (Kegiatan)</i>	12	35,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i>			200,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan (orang)</i>	35	70,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah peserta Abdi Yasa yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan (orang)</i>	35	130,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			35,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	Bidang Lalu Lintas Jalan
	<i>Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan)</i>	20	35,000,000	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	21.88	616,800,000	BPSPP I
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			616,800,000	BPSPP I

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/ Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A (lok)	8	170,000,000	BPSPP I
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Km)	7.75	446,800,000	BPSPP I
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			170,000,000	BPSPP I
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	170,000,000	BPSPP I
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>	-	-	BPSPP I
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>	-	-	BPSPP I
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>	-	-	BPSPP I
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>	-	-	BPSPP I
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			446,800,000	BPSPP I
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	20	112,000,000	BPSPP I
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	50	334,800,000	BPSPP I
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	-	-	BPSPP I
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP I
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	35.00	1,174,080,000	BPSPP II
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			1,174,080,000	BPSPP II
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (lok)	7	120,000,000	BPSPP II
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Km)	8.30	1,054,080,000	BPSPP II
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			120,000,000	BPSPP II
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	120,000,000	BPSPP II
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>		-	BPSPP II
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>		-	BPSPP II
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>		-	BPSPP II
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>		-	BPSPP II
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1,054,080,000	BPSPP II

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/ Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	40	332,280,000	BPSPP II
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	52	721,800,000	BPSPP II
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	-	-	BPSPP II
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP II
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	43.75	1,260,740,000	BPSPP III
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1,260,740,000	BPSPP III
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (lok)	7	120,000,000	BPSPP III
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Km)	9.75	1,140,740,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			120,000,000	BPSPP III
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	120,000,000	BPSPP III
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>	-	-	BPSPP III
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>	-	-	BPSPP III
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>	-	-	BPSPP III
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>	-	-	BPSPP III
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1,140,740,000	BPSPP III
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	46	393,140,000	BPSPP III
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	76	747,600,000	BPSPP III
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	-	-	BPSPP III
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP III
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	19.23	750,460,000	BPSPP IV
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			750,460,000	BPSPP IV
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah	5	120,000,000	BPSPP IV

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	IV Kelas A (lok)			
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Km)	8.25	630,460,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			120,000,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	120,000,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>	-	-	BPSPP IV
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>	-	-	BPSPP IV
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>	-	-	BPSPP IV
	<i>umlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)</i>	-	-	BPSPP IV
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>	-	-	BPSPP IV
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			630,460,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	50	279,460,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	62	351,000,000	BPSPP IV
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	-	-	BPSPP IV
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP IV
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	53.85	739,880,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			739,880,000	BPSPP V
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)	7	125,500,000	BPSPP V
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Km)	8.75	614,380,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			125,500,000	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	125,500,000	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>	-	-	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>	-	-	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>	-	-	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh)</i>	-	-	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)</i>	-	-	BPSPP V
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh)</i>	-	-	BPSPP V

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/ Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>	-	-	BPSPP V
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			614,380,000	BPSPP V
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	50	277,780,000	BPSPP V
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	52	336,600,000	BPSPP V
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	-	-	BPSPP V
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP V
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	20.69	1,165,460,000	BPSPP VI
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1,165,460,000	BPSPP VI
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)	7	175,000,000	BPSPP VI
	Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Km)	9.00	990,460,000	BPSPP VI
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			175,000,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')</i>	5,000	175,000,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)</i>	-	-	BPSPP VI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)</i>	-	-	BPSPP VI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)</i>	-	-	BPSPP VI
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (ruas)</i>	-	-	BPSPP VI
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			990,460,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (unit)</i>	50	276,660,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (org)</i>	44	713,800,000	BPSPP VI
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)	-	-	BPSPP VI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)</i>	-	-	BPSPP VI
Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	15.73	1,700,024,000	JATRANSKA

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/ Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			1,700,024,000	JATRANSKA
	Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	3.39	1,700,024,000	JATRANSKA
	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	-	-	JATRANSKA
<i>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian</i>			1,700,024,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok)</i>	4	877,024,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)</i>	3	242,000,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA (Lok)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang (lok)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang (lok)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan Gazon di perlintasan Sebidang (bh)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System (lok)</i>	1	581,000,000	JATRANSKA
<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian</i>	<i>Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Kegiatan)</i>	-	-	JATRANSKA
Pengelolaan Pelayaran	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	37.50	442,000,000	Bidang Pelayaran
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (Lokasi)	3.00	292,000,000	Bidang Pelayaran
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)</i>	1	30,000,000	Bidang Pelayaran
<i>Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>			215,000,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit)</i>	8	215,000,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai (lokasi)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
<i>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>			47,000,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP (Orang)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (dokumen)</i>	12	47,000,000	Bidang Pelayaran

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	<i>Jumlah alat keselamatan ASDP (Buah)</i>		-	Bidang Pelayaran
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Lokasi)	4	150,000,000	Bidang Pelayaran
<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional</i>			150,000,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan (Lok)</i>	3	20,250,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku)</i>	10	8,585,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok)</i>	2	10,900,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Lok)</i>	13	110,265,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy (lok)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Pemeliharaan SBNP (lok)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran (lok)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	47.38	8,717,753,000	DISHUB
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5.03	50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM (Kendaraan)	324	50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>			50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah Evaluasi Trayek AKDP (dokumen)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan)</i>	30	50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	-	-	Bidang Angkutan Jalan
<i>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi (Trayek)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	87.65	1,454,790,000	Bidang Angkutan Jalan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	4,088,901	1,364,790,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok)</i>	28	1,364,790,000	Bidang Angkutan Jalan
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan (Perusahaan)	15	40,000,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			40,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok)</i>	1	20,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan)</i>	1	20,000,000	Bidang Angkutan Jalan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi (perusahaan)	15	50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi</i>			50,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan)</i>	1	25,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek (Perusahaan)</i>	15	25,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	28.57	235,000,000	Bidang Angkutan Jalan
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani (trayek)	4	235,000,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			110,000,000	Bidang Angkutan Jalan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	<i>Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng (Paket)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal (Dok)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok)</i>	1	110,000,000	Bidang Angkutan Jalan
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			125,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi (Org)</i>	300	125,000,000	Bidang Angkutan Jalan
	<i>Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM (Lok)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	-	-	Bidang Angkutan Jalan
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis (Kali)</i>	-	-	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	21.62	4,182,522,000	JATRANSKA
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek (Terminal)	6.92	4,182,522,000	JATRANSKA
<i>Pembangunan Gedung Terminal</i>			2,038,199,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pembangunan Terminal (Tahapan)</i>	1	1,968,199,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan Tanah Terminal (Paket)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal (Paket)</i>	1	70,000,000	JATRANSKA
<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</i>			1,999,623,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengembangan Terminal (Terminal)</i>	4	1,919,623,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV (Terminal)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Penerapan Sistem Informasi (Terminal)</i>	-	-	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal (Paket)</i>	4	80,000,000	JATRANSKA
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B</i>			34,700,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali)</i>	4	34,700,000	JATRANSKA
	<i>Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Type B (Terminal)</i>	-	-	JATRANSKA
<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>	<i>Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)</i>	1	110,000,000	JATRANSKA
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	58.33	110,000,000	JATRANSKA
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk	1	110,000,000	JATRANSKA

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)			
<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>			110,000,000	JATRANSKA
	Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (dok)	-	-	JATRANSKA
	Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis (Lok)	2	110,000,000	JATRANSKA
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	50.97	176,455,000	BPSPP I
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kend)	497	25,000,000	BPSPP I
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			25,000,000	BPSPP I
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	9	12,500,000	BPSPP I
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	9	12,500,000	BPSPP I
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kend)	86,247	15,625,000	BPSPP I
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	15,625,000	BPSPP I
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A (Kegiatan)	8	135,830,000	BPSPP I
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah I Kelas A (lok)</i>	4	135,830,000	BPSPP I
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	40.88	105,670,000	BPSPP II
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	280	20,000,000	BPSPP II

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Daerah Provinsi				
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			20,000,000	BPSPP II
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	6	10,000,000	BPSPP II
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	6	10,000,000	BPSPP II
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kend)	18,697	10,500,000	BPSPP II
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	10,500,000	BPSPP II
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B (Kegiatan)	4	75,170,000	BPSPP II
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah II Kelas B (lok)</i>	2	75,170,000	BPSPP II
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	49.91	309,250,000	BPSPP III
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	541	40,850,000	BPSPP III
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			40,850,000	BPSPP III
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	10	20,000,000	BPSPP III
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	10	20,850,000	BPSPP III
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kend)	754,668	50,400,000	BPSPP III
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	50,400,000	BPSPP III

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A (Kegiatan)	22	218,000,000	BPSPP III
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah III Kelas A (lok)</i>	11	218,000,000	BPSPP III
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	78.71	156,900,000	BPSPP IV
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	869	30,000,000	BPSPP IV
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30,000,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	7	15,000,000	BPSPP IV
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	7	15,000,000	BPSPP IV
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kend)	70,024	25,000,000	BPSPP IV
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	25,000,000	BPSPP IV
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (Kegiatan)	6	101,900,000	BPSPP IV
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah IV Kelas A (lok)</i>	3	101,900,000	BPSPP IV
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	65.49	195,500,000	BPSPP V
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	833	30,000,000	BPSPP V

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30,000,000	BPSPP V
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	6	15,000,000	BPSPP V
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	6	15,000,000	BPSPP V
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kend)	174,662	15,500,000	BPSPP V
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	15,500,000	BPSPP V
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B (Kegiatan)	8	150,000,000	BPSPP V
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B (lok)</i>	4	150,000,000	BPSPP V
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	82.72	247,450,000	BPSPP VI
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	1,096	30,000,000	BPSPP VI
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30,000,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (Perusahaan)</i>	7	15,000,000	BPSPP VI
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)</i>	7	15,000,000	BPSPP VI
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kend)	152,025	21,990,000	BPSPP VI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (Kali)</i>	365	21,990,000	BPSPP VI
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada	10	195,460,000	BPSPP VI

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (Kegiatan)			
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A (lok)</i>	5	195,460,000	BPSPP VI
Pengelolaan Pelayaran	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	49.25	205,000,000	Bidang Pelayaran
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (Perusahaan)	264	205,000,000	Bidang Pelayaran
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (BAP)</i>	50	65,000,000	Bidang Pelayaran
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</i>			140,000,000	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan jasa pengurusan transportasi di perairan; (org)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan Depo Peti Kemas; (org)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan bongkar muat barang (org)</i>	-	-	Bidang Pelayaran
	<i>Jumlah Appraisal KMC. Kartini I (Paket)</i>	1	140,000,000	Bidang Pelayaran
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	66.96	1,289,216,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-	14	1,289,216,000	Balai Transportasi

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Karimunjawa (trip/tahun)			Jawa Tengah
<i>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1 (Paket)</i>	1	1,289,216,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	46.67	93,166,600,000	DISHUB
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	31.92	93,166,600,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Bus)	98	91,507,900,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan (koridor)</i>	6	91,507,900,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional (Shelter)	165	1,658,700,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng (Paket)</i>	4	1,658,700,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	78.50	57,726,326,000	DISHUB
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	78.50	57,276,326,000	DISHUB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	56,074,226,000	Kantor DISHUB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	41,187,620,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN</i>	12	40,297,420,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	820,200,000	Kantor DISHUB
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun</i>	12	70,000,000	Kantor DISHUB

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	165,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah</i>	<i>12</i>	<i>165,000,000</i>	Kantor DISHUB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	50,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan</i>	-	-	Kantor DISHUB
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12</i>	<i>20,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar</i>	<i>20</i>	<i>30,000,000</i>	Kantor DISHUB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	2,061,000,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	<i>12</i>	<i>20,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor</i>	-	-	Kantor DISHUB
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	<i>800</i>	<i>40,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	<i>12</i>	<i>50,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	<i>12</i>	<i>200,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	<i>12</i>	<i>126,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD</i>	<i>12</i>	<i>5,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu</i>	<i>12</i>	<i>60,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah</i>	<i>12</i>	<i>1,500,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan SPBE</i>	<i>3,000</i>	<i>60,000,000</i>	Kantor DISHUB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	50,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional</i>	-	-	Kantor DISHUB
<i>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	<i>Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor</i>	-	-	Kantor DISHUB
<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah unit pengadaan meubelair</i>	<i>10</i>	<i>50,000,000</i>	Kantor DISHUB

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin</i>	-	-	Kantor DISHUB
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya</i>	-	-	Kantor DISHUB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	10,598,206,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	4,000,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD</i>	12	1,460,000,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	9,134,206,000	Kantor DISHUB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	1,962,400,000	Kantor DISHUB
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional</i>	12	837,400,000	Kantor DISHUB
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	12	150,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	4	725,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	100,000,000	Kantor DISHUB
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor</i>	12	150,000,000	Kantor DISHUB
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	153,500,000	BPSPP I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	2,000,000	BPSPP I
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	2,000,000	BPSPP I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	17,500,000	BPSPP I
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	4,000,000	BPSPP I
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	100	5,000,000	BPSPP I

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	4,000,000	BPSPP I
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	1,500,000	BPSPP I
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	3,000,000	BPSPP I
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	20,000,000	BPSPP I
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)	-	-	BPSPP I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	20,000,000	BPSPP I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	114,000,000	BPSPP I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)	2	110,000,000	BPSPP I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	4,000,000	BPSPP I
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	54,500,000	BPSPP II
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	2,000,000	BPSPP II
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	2,000,000	BPSPP II
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	9,500,000	BPSPP II
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	2,000,000	BPSPP II
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	60	3,000,000	BPSPP II
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	2,000,000	BPSPP II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	1,000,000	BPSPP II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan	12	1,500,000	BPSPP II

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	<i>penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	7,000,000	BPSPP II
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	-	-	BPSPP II
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	7,000,000	BPSPP II
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	36,000,000	BPSPP II
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	1	35,000,000	BPSPP II
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	1,000,000	BPSPP II
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	308,700,000	BPSPP III
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	2,000,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Asn (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	2,000,000	BPSPP III
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	49,500,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	11,000,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	240	12,000,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	11,000,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	5,500,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	10,000,000	BPSPP III
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	43,200,000	BPSPP III
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	-	-	BPSPP III

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	43,200,000	BPSPP III
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	214,000,000	BPSPP III
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	4	204,000,000	BPSPP III
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	10,000,000	BPSPP III
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	233,500,000	BPSPP IV
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	2,000,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	2,000,000	BPSPP IV
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	17,500,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	4,000,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	100	5,000,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	4,000,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	1,500,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	3,000,000	BPSPP IV
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	25,000,000	BPSPP IV
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	-	-	BPSPP IV
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	25,000,000	BPSPP IV
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	189,000,000	BPSPP IV
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	2	185,000,000	BPSPP IV

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
<i>Lainnya</i>				
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	4,000,000	BPSPP IV
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	127,500,000	BPSPP V
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	2,000,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN(BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	2,000,000	BPSPP V
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	13,500,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	3,000,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	80	4,000,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	3,000,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	1,500,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	2,000,000	BPSPP V
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	19,000,000	BPSPP V
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	-	-	BPSPP V
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	19,000,000	BPSPP V
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	93,000,000	BPSPP V
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	2	90,000,000	BPSPP V
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	3,000,000	BPSPP V
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	90,400,000	BPSPP VI

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	2,000,000	BPSPP VI
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>2,000,000</i>	BPSPP VI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	22,000,000	BPSPP VI
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>5,000,000</i>	BPSPP VI
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>120</i>	<i>6,000,000</i>	BPSPP VI
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>5,000,000</i>	BPSPP VI
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>2,000,000</i>	BPSPP VI
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>4,000,000</i>	BPSPP VI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	26,400,000	BPSPP VI
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	BPSPP VI
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>26,400,000</i>	BPSPP VI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	40,000,000	BPSPP VI
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>1</i>	<i>35,000,000</i>	BPSPP VI
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	<i>12</i>	<i>5,000,000</i>	BPSPP VI
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100.00	234,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Balai Transportasi Jawa Tengah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12	26,500,000	Balai Transportasi

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
	(Balai Transportasi Jawa Tengah)			Jawa Tengah
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	7,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	120	6,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	10,500,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	3,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>	<i>Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	5,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	5,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	202,500,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	200,000,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	-	-	Balai Transportasi Jawa Tengah
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	2,500,000	Balai Transportasi Jawa Tengah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	77.51	450,000,000	DISHUB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100.00	450,000,000	Kantor DISHUB

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian/ Anggaran		Penanggungjawab
		2022		
		K	(Rp)	
2	3	4	5	6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	14	450,000,000	Kantor DISHUB
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun</i>	<i>10</i>	<i>350,000,000</i>	Kantor DISHUB
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD</i>	<i>4</i>	<i>100,000,000</i>	Kantor DISHUB
TOTAL			170,418,443,000	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun ke-4 dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja tugas fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.

Tabel 2. 7 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022 Perubahan

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan			
	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	39,38%
Sasaran			
1.	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	47,74 %
2.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	23,73 %
3.	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67 %
Tujuan			
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	78,50
Sasaran			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	78,50
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	77,51

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Perubahan

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022 tersebut, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2022 Perubahan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 109.379.027.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.936.216.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 1.665.024.000,-	APBD
4. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 57.438.176.000,-	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 170,418,443,000,-	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

Selain itu terdapat aplikasi yang digunakan secara internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (**Pake-Siska**). Aplikasi ini digunakan sebagai pengumpulan data kinerja dan alat untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan secara actual,

cepat dan mudah diakses dalam rangka pencapaian akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal Pemetaan Simpul dan Fasilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Secara Geografis Dinas Perhubungan membangun system aplikasi berupa Informasi Geografis yang memuat sebaran lokasi, rencana kebutuhan dan kondisi eksisting terkait simpul transportasi berupa Terminal tipe B, Perlintasan sebidang Kereta Api, shelter BRT, Daerah Rawan Kecelakaan, Area Traffic Management System dan perlengkapan jalan yang menjadi sumber data perencanaan program kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Tingkat Ketercapaian Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Baik	> 100%;
2	Baik	85 – 100%;
3	Cukup	65 – 84,99%;
4	Kurang	50 - 64,99%;
5	Sangat Kurang	< 50,%

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Realisasi capain Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 telah mencapai nilai yang ditargetkan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah serta mendukung Ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung melalui 3 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 110.7415 % dan capaian tujuan 2 : meningkatnya tata kelola organisasi dinas perhubungan provinsi jawa tengah dengan tingkat capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 101.5924 %. sebagaimana berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Katagori
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	39.38	43.61	110.7415	Sangat Baik
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,74	54,99	115,1655	Sangat Baik
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,73	29,19	123,0088	Sangat Baik
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	Baik
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	78.5	79.75	101.5924	Sangat Baik
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78,5	79,75	101,5924	Sangat Baik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	77,51	78,18	100,8644	Sangat Baik

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat baik.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	30,01	30,01	100	36,31	37,08	102,12	39,38	43,61	110.7415
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	37,84	37,84	100	42,64	43,38	101,73	47,74	54,99	115,1655
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	12,19	12,85	105,41	19,62	21,18	107,95	23,73	29,19	123,0088
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	40,00	40,00	100	46,67	46,67	100,00	46,67	46,67	100,00
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	67,73	77,66	114,66	70,33	78,28	111,30	78,5	79,75	101.5924
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	65,00	78,00	120,00	70	79,25	113,21	78,5	79,75	101,5924

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,45	77,31	109,74	70,65	77,31	109,43	77,51	78,18	100,8644

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjangurusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 3 (tiga) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Untuk mengetahui tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2023 (Murni)	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD (%)	Tingkat Kemajuan	
A	MEMANTAPKAN TRANSPORTASI BERORIENTASI KONEKTIVITAS KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	SISTEM YANG PADA ANTAR	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	43,61	59,50	73,29	Akan Tercapai
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI		Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	54,99	60,38	91,07	Akan Tercapai
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI		Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	29,19	51,45	56,73	Perlu Upaya Keras
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI		Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	66,67	70,00	Akan Tercapai
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	TATA ORGANISASI	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	79,75	75,50	105,63	Tercapai

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2023 (Murni)	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	79,75	80	99.69	Akan Tercapai
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	78,18	71	110.11	Tercapai

Kategori tingkat ketercapaian kinerja terhadap RPJMD :

- 1) Tercapai : $\geq 100\%$
- 2) Akan Tercapai : $\geq 60\% - < 100\%$
- 3) Perlu Upaya Keras : $< 60\%$

Capaian kinerja tujuan 1 (satu) terhadap target akhir RPJMD dengan indikator Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah tercapai sebesar 73,29% masuk dalam katagori akan tercapai, dengan 2 (dua) indikator sasaran masuk dalam katagori akan tercapai yaitu Persentase layanan jaringan distribusi transportasi tercapai sebesar 91,07% dan Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal tercapai sebesar 70% serta 1 (satu) indikator masuk dalam katagori **perlu upaya keras** yaitu Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi dengan tercapai sebesar 56,73%.

Capaian kinerja tujuan 2 (dua) terhadap target akhir RPJMD dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi tercapai sebesar 105,63% masuk dalam katagori tercapai, dengan dengan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam katagori akan tercapai yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 99,69% dan dengan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam katagori tercapai yaitu Nilai SAKIP perangkat daerah tercapai sebesar 110,11%.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut

Tabel 3. 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
----	----------------	-------------------	--------	--------	-----------	---------------------	---------------------------------	-----------------------

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	39.38	43.61	110.7415		
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,74	54,99	115,1655	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP dan kemudahan pengurusan izin • Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya sistem sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada perizinan angkutan laut sehingga para pengusaha dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan SIUP baru dan atau perubahan • koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,73	29,19	123,0088	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT 	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
							dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78.5	79.75	101.5924		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	78,5	79,75	101,5924	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Terminal Type B 	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	77,51	78,18	100,8644	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien Peningkatan kualitas Monev melalui penerapan Teknologi IT 	

Sesuai dengan tabel tersebut kinerja dinas perhubungan masuk dalam katagori sangat baik karena hal tersebut didukung oleh faktor sebagaimana tabel.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel.

Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	39.38	43.61	110.7415	112,980,267,000.00	111,393,474,483.00	98.6	1.4
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	47,74	54,99	115,1655	8,480,403,000.00	8,048,737,502.00	94.9	5.1
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	23,73	29,19	123,0088	10,738,704,000.00	10,495,698,047.00	97.7	2.3
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67	46,67	100,00	93,761,160,000.00	92,849,038,934.00	99.0	1.0
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	78.5	79.75	101.5924	57,438,176,000.00	56,085,367,456.00	97.6	2.4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	78,5	79,75	101,5924				
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP perangkat daerah	77,51	78,18	100,8644				

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Provinsi Jawa Tengah								

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) Memantapkan Sistem Transportasi yang Berorientasi pada Konektivitas antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 111,393,474,483 atau 98,6% dari total pagu sebesar Rp 112,980,267,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,4% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1,586,792,517. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian tujuan 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 56,085,367,456 atau 97,6% dari total pagu sebesar Rp 57,438,176,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,4% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1,352,808,544. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai dilihat dari meningkatnya nilai SKM dan SAKIP Dinas Perhubungan, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.1.6.1 Capaian Tujuan 1 : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 110.7415 %. Dalam tujuan 1 (satu) memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 3 sasaran dan 4 program dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Tujuan Ke-1)

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH					
	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	39,38	43,61	110,7415	
1	SASARAN : MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI					
	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,74	54,99	115,1655	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,29	5,49	103,78	Menunjang
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	87,65	124,87	142,46	Menunjang
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28,57	28,57	100	Menunjang
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	23,19	28,13	121,30	Menunjang
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	58,33	60	102,86	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,41	52,41	100	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	42,77	42,77	100	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	51,20	51,20	100	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79,26	79,71	100,57	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66,12	66,43	100,47	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	83,77	83,92	100,18	Menunjang
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					

	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	49,25	49,25	100	Menunjang
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	66,96	78,39	117,07	Menunjang
2	SASARAN : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI					
	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,73	29,19	123,0088	Menunjang
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	25,68	30,03	116,94	Menunjang
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	8,67	8,90	102,65	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	21,88	28,13	128,56	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	35	40	114,29	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	43,75	50	114,29	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	19,23	23,08	120,02	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	53,85	61,54	114,28	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	20,69	27,59	133,35	Menunjang
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	37,50	37,50	100	Menunjang
2.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	15,73	17,88	113,67	Menunjang
3	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI					
	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	Menunjang
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					

JALAN (LLAJ)						
Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31,92	31,92	100		Menunjang
Total Indikator Program				24		
Total Sangat Tinggi				24		
Total Tinggi				0		
Total Sedang				0		
Total Rendah				0		
Total Sangat Rendah				0		

Sumber : e-controlling 2022

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 115,1655 % dengan realisasi 54,99% dari target 47,74 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Penerbangan dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 10 (sepuluh) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM capaiannya 103,78% dengan realisasi 5,49% dari target 5,29%, Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru capaiannya 142,46% dengan realisasi 124,87% dari target 87,65%, Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis capaiannya 100% dengan realisasi 28,57% dari target 28,57%, Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan capaiannya 121,30% dengan realisasi 28,13 % dari target 23,19%, Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis capaiannya 102,86% dengan realisasi 60% dari target 58,33%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capaiannya 100% dengan realisasi 52,41% dari target 52,41%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capaiannya 100% dengan realisasi 42,77% dari target 42,77%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

capaiannya 100% dengan realisasi 51,20% dari target 51,20%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capaiannya 100,57% dengan realisasi 79,71% dari target 79,26%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capaiannya 100,47% dengan realisasi 66,43% dari target 66,12%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capaiannya 100,18% dengan realisasi 83,92% dari target 83,77%, Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin capaiannya 100% dengan realisasi 49,25% dari target 49,25%, Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa capaiannya 117,07% dengan realisasi 78,39% dari target 66,96%.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya Ketercapaian pada indikator Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP serta kemudahan dalam pengurusan izin, sementara untuk indikator Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan realisasinya melebihi target disebabkan karena adanya dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), rekomendasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan sampai dengan tahun 2022 terealisasi sesuai target melalui pembangunan terminal Kutoarjo (tahap 2) dan peningkatan terminal di 3 terminal (Terminal Gagakrimang Kab. Blora, Penggung Kab. Boyolali dan Banyuputih Kab. Batang). Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2022 terealisasi 6 trayek (sesuai dengan target) serta pada TA. 2022 di lakukan perpanjangan rute yang semula dari Terminal Mangkang - bahurekso diperpanjang Menjadi Terminal Mangkang - Terminal Bahurekso – RTH Weleri.



Gambar 3. 1 Peresmian perpanjangan rute Trans Jateng Terminal Bahurekso – RTH Weleri oleh Bupati Kendal Tahun 2022



Gambar 3. 2 Pembangunan Terminal Kutoarjo (tahap 2)

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 2 (dua) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa capaiannya 117,07 % dengan realisasi 78,39% melebihi dari target 66,96%; indikator Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin capaiannya 100 % dengan realisasi 49,25 %. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan angkutan laut

dan jasa terkait angkutan di perairan. Jumlah perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin sampai dengan tahun 2022 terealisasi 264 dokumen (Jasa Pengurusan Transportasi, Depo Peti Kemas dan Bongkar Muat) serta bertambahnya peminat wisatawan untuk mengunjungi Pulau Karimunjawa sehingga membuat beberapa jadwal reguler penyeberangan menuju Karimunjawa baik dari Semarang dan Jepara bertambah diantaranya dilayani oleh Kapal Cepat Bahari Express, Kapal Siginjai dan Kapal Kelimutu.

Kendala dalam penyelenggaraan program pengelolaan pelayaran diantaranya adalah tidak tersedianya alternatif penggunaan moda selain kapal yang mana jadwal keberangkatan kapal sangat bergantung pada cuaca, selain itu penghentian operasional rute Penerbangan menggunakan pesawat udara dari Semarang – Karimunjawa akibat adanya Covid 19 dan pekerjaan peningkatan Terminal Bandara Dewadaru serta tidak beroperasinya KMC Kartini I yang telah memasuki usia pakai.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 123,0088 % dengan realisasi 29,19% dari target 23,73%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 8 (delapan) indikator yang mendukung capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang capaiannya 116,94% dengan realisasi 30,03% dari target 25,68%, Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan capaiannya 102,65% dengan realisasi 8,90% dari target 8,67%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capaiannya 128,56% dengan realisasi 28,13% dari target 21,88%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola

Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capaiannya 114,29% dengan realisasi 40% dari target 35%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A capaiannya 114,29% dengan realisasi 50% dari target 43,75% Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capaiannya 120,02% dengan realisasi 23,08% dari target 19,23%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capaiannya 114,28% dengan realisasi 61,54% dari target 53,85%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capaiannya 133,35% dengan realisasi 27,59% dari target 20,69%, Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang capaiannya 100% dengan realisasi 37,50% dari target 37,50%, Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api capaiannya 113,67% dengan realisasi 17,88% dari target 15,73%.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat baik**. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan sampai dengan tahun 2022 terealisasi 40 lokasi dari target 40 lokasi karena pada TA. 2022 dilakukan rehabilitasi di 6 (enam) lokasi Daerah Rawan Kecelakaan. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang didukung dengan penyediaan perlengkapan jalan yang sampai dengan tahun 2022 terealisasi Rambu 1.590 bh dari target 1.590 bh, RPPJ 230 unit dari ditargetkan 230 unit, Marka 188.546 m' dari ditargetkan 153.000 m', Guardrail 494 beam dari ditargetkan 440 beam, LPJU 1.760 unit dari ditargetkan 1.760 unit, APILL 8 unit dari ditargetkan 8 unit, WL 46 unit dari ditargetkan 46 unit, Deliniator 1.460 bh dari ditargetkan 1.460 bh, Cermin Tikungan 66 unit dari ditargetkan 66 unit. Jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan sampai dengan tahun 2022 terealisasi 35 orang (sesuai dengan target) pada TA.



Gambar 3. 3 Penyediaan Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Ruas Jatibarang - Ketanggungan



Gambar 3. 4 Pemasangan Perlengkapan Jalan (Guard Rail) Kabupaten Banyumas



Gambar 3. 5 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang capaiannya 100 % dengan realisasi 37,05% sesuai target. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** dengan fasilitas keselamatan pelayaran terpasang sampai dengan tahun 2022 terealisasi 3 (tiga) lokasi (sesuai dengan target) karena pada TA. 2022 dilakukan pemasangan di 2 (dua) lokasi 4 di ds. Prupuk utara Tegal- 4 ds. Wlahar brebes



Gambar 3. 6 LPJU Terpasang di Lintas Penyebrangan Sungai Kendal - Batang Ds. Jatipurwo (Kendal) dan Ds. Yosorejo (Batang)

Program Pengelolaan Perkeretaapian mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api capaiannya 113,67 % dengan realisasi 17,88% melebihi dari target 15,73%. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Perkeretaapian masuk dalam katagori sangat tinggi dengan fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api sampai dengan tahun 2022 terealisasi 3 (tiga) lokasi (sesuai dengan target) di ruas jalan Provinsi yang bersilangan dengan jalur Kereta Api berada di Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Grobogan.



Gambar 3. 7 Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS) di Perlintasan Sebidang Kereta Api JPL 9 Kabupaten Sukoharjo

c. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi

Sasaran berupa Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46,67% dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi capaiannya 100 % dengan realisasi 31,92% dari target 31,92 %. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi**. Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2022 terealisasi 6 trayek 98 bus dengan trayek dan jumlah bus tersebut, Angkutan Umum Aglomerasi mempunyai headway 23 menit.



Gambar 3. 8 Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi

3.1.6.2 Capaian Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 111,30% (realisasi nilai reformasi birokrasi 78,28 dari target 70,33. Dalam tujuan 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) program dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Tujuan Ke-2)

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH					
	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	78.5	79.75	101.5924	
1	SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Angka	78,5	79,75	101,5924	
1.1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
2	SASARAN : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Angka	77,51	78,18	100,8644	
2.1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	Menunjang
	Total Indikator				9	

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
	Total Sangat Tinggi				9	
	Total Tinggi				0	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran berupa Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Meningkatnya kualitas pelayanan capaiannya 101.5924 % dengan realisasi 79,75 dari target 78,5 Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Dari Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut, survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada 5 koridor unit pelayanan BRT Trans Jateng dengan jumlah populasi 4.627 orang, pada 24 terminal unit pelayanan Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah Populasi 4.620 orang serta pada 6 balai unit pelayanan Pembaharuan Izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah dengan jumlah populasi 217 Badan Usaha. Teknik penarikan sampel Survei Kepuasan Masyarakat ini dengan menggunakan rumus Krejcie and Morgan dengan keterwakilan sampel pada unit pelayanan BRT Trans Jateng 722 sampel (5 koridor), unit pelayanan Terminal Tipe B 1.251 sampel (22 terminal) dan unit pelayanan pembaharuan izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 195 sampel (6 BPSPP Wilayah). Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2022 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3,19 dan nilai hasil IKM 79,75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini cenderung tetap dari penilaian tahun sebelumnya 2021.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kegiatan evaluasi SAKIP tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan dan RB) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan evaluasi SAKIP telah dilakukan di 41 SKPD diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan evaluasi yang dilakukan diantaranya mencari informasi terkait penerapan Sistem AKIP serta melakukan penilaian sistem AKIP. Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 78,18 termasuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kerja yang handal. Nilai hasil evaluasi tersebut berasal dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja mendapatkan nilai 25,43 dari bobot penilaian sebesar 30%, Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 18,44 dari bobot penilaian sebesar 25%, Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,60 dari bobot penilaian sebesar 15% Evaluasi Kinerja mendapatkan nilai 7,87 dari bobot penilaian sebesar 10% dan Capaian kinerja mendapatkan nilai 13,85 dari bobot penilaian sebesar 20%. Dan disarankan perbaikan dari hasil LHE yaitu

- Pada aspek pemanfaatan Perencanaan Kinerja Tahunan, monitoring rencana aksi atas kinerja perlu ditingkatkan dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
- Membuat mekanisme yang memadai atau terstruktur mengenai SOP pengumpulan data kinerja, mencatat dan mensupervisi kinerja yang didukung teknologi informasi
- Memanfaatkan informasi kinerja dalam LKjIP untuk perbaikan penyusunan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja unit kerja.
- Pemantauan mengenai perkembangan/ kemajuan pencapaian kinerja SKPD agar mencantumkan masalah/ hambatan dan rekomendasi alternatif perbaikan manajemen kinerja yang memberikan rekomendasi alternatif perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal (BPK RI) dan pengawas Internal (APIP) yang belum selesai ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti **sebagaimana tabel 2.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022.**

Untuk capaian kinerja non urusan untuk Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah realisasinya telah mencapai dari nilai yang ditargetkan. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Kebijakan Yang Diterbitkan Tahun 2022

NO.	KEBIJAKAN	PERKEMBANGAN
1.	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022	Sudah ditetapkan
2.	Pembentukan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Sudah ditetapkan
3.	Pembentukan Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sudah ditetapkan
4.	Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penerapan "Pake Siska" Pengendalian Kegiatan Berbasis e-Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sudah ditetapkan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 204.112.865.000,- dan terelasisasi sebesar 194.619.417.057,- (95,35%). Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	2	4	12	13
	Dinas Perhubungan	170.418.443.000	167.478.841.939	98,28
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	56.236.076.000	54.923.212.683	97,67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.236.076.000	54.923.212.683	97,67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	434.528.550	96,56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.051.620.000	40.382.816.685	98,37
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	165.000.000	164.562.000	99,73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	19.576.000	39,15
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.021.000.000	1.956.452.019	96,81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.955.000	99,91
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.501.056.000	10.099.596.919	96,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.947.400.000	1.815.725.510	93,24
	Bidang Lalu Lintas	2.913.760.000	2.863.898.650	98,29
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.913.760.000	2.863.898.650	98,29
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.483.000.000	1.456.610.200	98,22
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.085.760.000	1.073.740.750	98,89
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	125.000.000	124.716.000	99,77
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	220.000.000	208.831.700	94,92
	Bidang Angkutan Jalan	1.502.440.000	1.427.531.450	95,01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.502.440.000	1.427.531.450	95,01
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.127.440.000	1.064.600.650	94,43
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	235.000.000	227.009.200	96,60
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	39.359.500	98,40
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	46.726.000	93,45
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.836.100	99,67
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	5.957.546.000	5.925.213.446	99,46
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.292.522.000	4.272.520.040	99,53
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	110.000.000	109.371.900	99,43
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe	4.182.522.000	4.163.148.140	99,54

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	2	4	12	13
	B			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.665.024.000	1.652.693.406	99,26
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.665.024.000	1.652.693.406	99,26
	Bidang Pelayaran	647.000.000	637.871.541	98,59
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	647.000.000	637.871.541	98,59
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	205.000.000	199.288.800	97,21
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	150.000.000	149.144.466	99,43
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	292.000.000	289.438.275	99,12
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	1.000.755.000	973.081.000	97,23
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	153.500.000	150.766.000	98,22
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.000.000	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	20.000.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000	112.266.000	98,48
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	847.255.000	822.315.000	97,06
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	670.800.000	651.740.000	97,16
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	15.625.000	15.625.000	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	135.830.000	129.950.000	95,67
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	25.000.000	100
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	1.266.550.000	1.236.731.800	97,65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.500.000	52.207.000	95,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	500	25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.500.000	9.500.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	6.568.000	93,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000	35.639.000	99,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.212.050.000	1.184.524.800	97,73
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.106.380.000	1.080.934.800	97,70
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	10.500.000	10.490.000	99,90

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	2	4	12	13
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.170.000	73.370.000	97,61
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	19.730.000	98,65
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	1.808.890.000	1.747.078.198	96,58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.700.000	299.353.198	96,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.500.000	75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.500.000	47.943.198	96,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.200.000	41.400.000	95,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.000.000	208.510.000	97,43
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.500.190.000	1.447.725.000	96,50
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.190.940.000	1.148.095.000	96,40
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.400.000	50.400.000	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.000.000	208.400.000	95,60
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.850.000	40.830.000	99,95
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	1.175.860.000	1.131.164.650	96,20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.500.000	230.651.000	98,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.500.000	75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.500.000	17.075.000	97,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	24.600.000	98,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.000.000	187.476.000	99,19
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	942.360.000	900.513.650	95,56
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	785.460.000	743.613.650	94,67
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	25.000.000	25.000.000	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101.900.000	101.900.000	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	1.062.880.000	1.011.712.650	95,19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.500.000	114.824.000	90,06
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	500	25
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.500.000	13.474.000	99,81
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000	8.500.000	44,74
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.000.000	92.350.000	99,30

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	2	4	12	13
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	935.380.000	896.888.650	95,88
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	739.880.000	714.077.650	96,51
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	15.500.000	15.500.000	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000	137.400.000	91,60
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	29.911.000	99,70
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	1.562.310.000	1.535.333.400	98,27
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.400.000	87.081.250	96,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.000.000	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.000.000	20.544.470	93,38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.400.000	26.400.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	39.136.780	97,84
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.471.910.000	1.448.252.150	98,39
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.224.460.000	1.202.062.150	98,17
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	21.990.000	21.990.000	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	195.460.000	194.200.000	99,36
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100
	Balai Transportasi Jawa Tengah	95.284.376.000	94.066.012.471	98,72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	234.000.000	227.272.325	97,12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.500.000	26.259.925	99,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	1.118.400	22,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.500.000	199.894.000	98,71
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	93.761.160.000	92.849.038.934	99,03
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.658.700.000	1.648.105.990	99,36
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	92.102.460.000	91.200.932.944	99,02
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.289.216.000	989.701.212	76,77
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.289.216.000	989.701.212	76,77

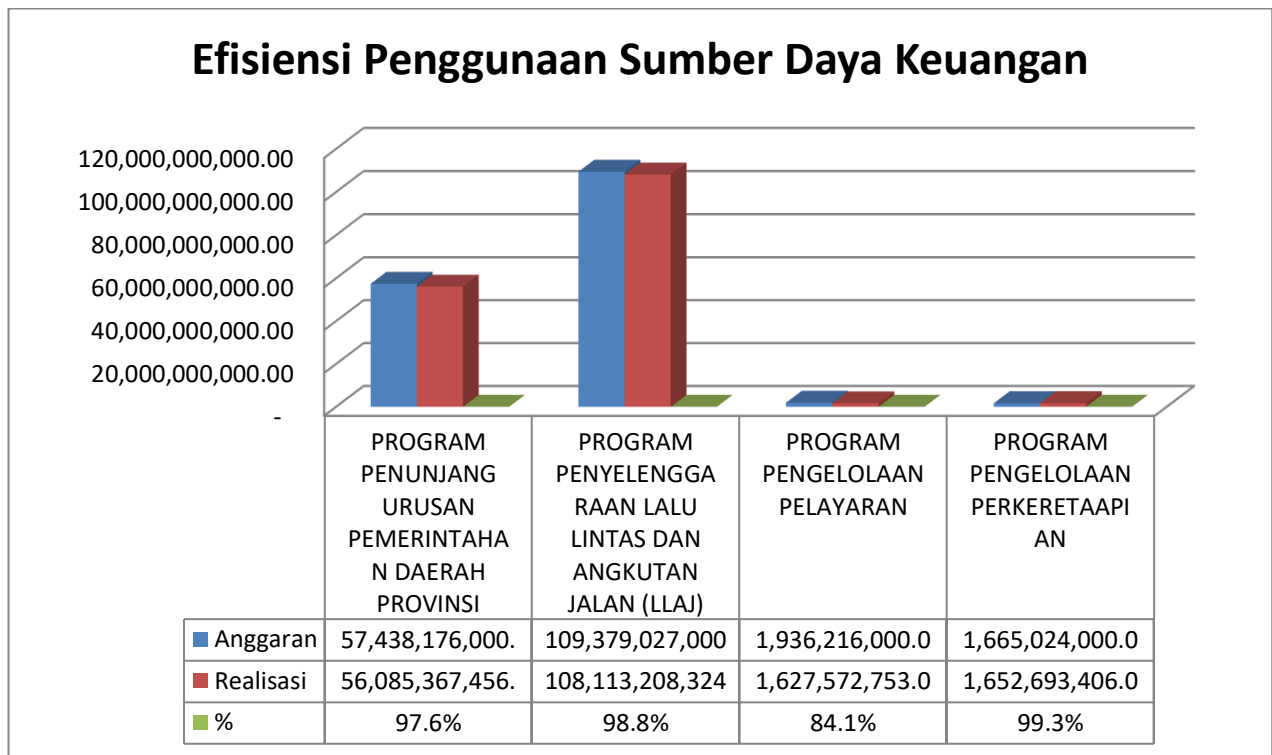
Dalam peaksanaan tersebut terdapat kegiatan dengan deviasi anggaran belanja kurang dari 70%, Meskipun belanja tidak terserap 100% namun

keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Kegiatan dengan penyerapan anggaran dibawah 70% dan justifikasinya sebagaimana berikut :

Tabel 3. 11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				DEVIASI		JUSTIFIKASI
			FISIK		KEUANGAN		FISIK	KEU	
			Rp	%	Rp	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	2.000.000	2.000.000	100	1000.000	50	-	50	Efisiensi pembayaran Honorarium Pengadaan barang/ jasa
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 5 Kelas B	2.000.000	2.000.000	100	500.000	25	-	75	Efisiensi pembayaran Honorarium Pengadaan barang/ jasa
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	2.000.000	2.000.000	100	1000.000	50	-	50	Efisiensi pembayaran Honorarium Pengadaan barang/ jasa
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	5.000.000	5.000.000	100	1.118.400	22,37	-	77,53	Efisiensi pembayaran Honorarium Pengadaan barang/ jasa

3.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan



Gambar 3. 9 Grafik Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 108.113.208,324 atau 98,8% dari total pagu sebesar Rp 109.379.027.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,8% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya karena Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien antara lain adanya penambahan pemasangan dan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Pelayaran** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 1.627.572.753 atau 84,1% dari total pagu sebesar Rp 1.936.216.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,9% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya sistem sistem Online Single Submission Risk Based

Approach (OSS-RBA) pada perizinan angkutan laut sehingga para pengusaha dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan SIUP baru dan atau perubahan, serta efisiensi kegiatan pemeliharaan KMC Kartini 1 difokuskan hanya untuk pemeliharaan yang berfungsi untuk mempertahankan nilai aset.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Perkeretaapian** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 1.652.639.406 atau 99,3% dari total pagu sebesar Rp 1.665.024.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,7% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi, efisiensi tersebut berasal dari adanya bantuan teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang Kereta Api.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 56.085.367.465 atau 97,6% dari total pagu sebesar Rp 57.438.176.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,4% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi tersebut berasal dari Pelaksanaan diklat dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19, Efisiensi Belanja Telepon, Air dan Listrik dan sisa anggaran kontrak.

3.3 Inovasi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya pembaharuan agar dapat mencapai kinerja dinas. Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah berinovasi terhadap beberapa sistem yang ada, dalam hal ini inovasi pada pengembangan sistem. Pengembangan aplikasi Si Anteng untuk mempermudah pengguna Trans Jateng mengetahui informasi posisi bus secara real time dan letak halte terdekat, serta upgrade aplikasi operating system untuk IOS dan APPLE serta penambahan fitur Cashless pada aplikasi SiAnteng. Aplikasi SiAnteng meningkatkan kemudahan bagi pengguna BRT Trans Jateng yang berimplikasi positif meningkatkan kinerja Program Pengembangan Angkutan Umum Aglomerasi (BRT Trans Jateng) dimana kegunaannya adalah untuk mengetahui informasi layanan Trnas Jateng,

menyampaikan feedback berupa kritik dan saran, serta informasi atau pengumuman adanya perubahan layanan Trans Jateng yang bermanfaat memudahkan pemantauan dan pengawasan operasional Trans Jateng.



Gambar 3. 10 Aplikasi Si-Anteng

3.4 Penghargaan

Sebagai wujud kinerja nyata urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 memperoleh penghargaan tingkat Nasional, diantaranya:

- 1) Juara kategori Pembina terbaik II pelajar pelopor tingkat nasional dari kementerian perhubungan;
- 2) Peringkat I Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan dalam kegiatan *Railways Safety Awards 2022*.



Gambar 3. 11 Piagam Penghargaan Pembina Terbaik II



Gambar 3. 12 Piagam Penghargaan Railways Safety Awards 2022

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2018-2023 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh "Isu Strategis" sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 sasaran, yaitu

Tujuan Pertama : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 115.1655 % dengan realisasi 54.98 % dari target 47.74 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh : 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi

capaiannya 123.0088 % dengan realisasi 29.19 % dari target 23.73 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian;

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46,67% dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian kinerja 100% sesuai target yaitu Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi.

Tujuan Kedua : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan IKM pada Tahun 2022 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3.23 dan nilai hasil IKM 80.75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.
- b) **Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 78.18 meningkat dari tahun 2021 75.28, termasuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik).
2. Tingkat capaian kinerja pada tujuan 1 Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar 110.7415% atau sangat baik meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 102,12% peningkatan tersebut karena peningkatan outcome pada indikator Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum melebihi target disebabkan karena dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP serta kemudahan dalam pengurusan izin dan untuk indikator Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan disebabkan karena dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan, meningkatnya wisatawan untuk mengunjungi Pulau Karimunjawa membuat beberapa jadwal reguler penyeberangan menuju Karimunjawa meningkat diantaranya Kapal Cepat Bahari Express, Kapal Siginjau dan Kapal Kelimutu.

3. Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 terhadap target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebesar 73,29% masuk dalam katagori akan tercapai, dengan 2 (dua) indikator sasaran masuk dalam katagori akan tercapai yaitu Persentase layanan jaringan distribusi transportasi tercapai sebesar 91,07% dan Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal tercapai sebesar 70% serta 1 (satu) indikator masuk dalam katagori **perlu upaya keras** yaitu Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi dengan tercapai sebesar 56,73%.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 167.478.841.939,00 atau (98,28%) dari total anggaran sebesar Rp. 170.418.443.000,00 namun realisasi fisik tercapai 100%.
5. Beberapa tantangan terkait pelaksanaan program / kegiatan dalam penyelesaian issue strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - a) Penerapan OSS dibarengi Peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan AKDP dan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan.
 - b) Kesenjangan wilayah terkait dengan ruang pergerakan, konektivitas dan simpul transportasi antara desa-kota maupun antara kota-kota (kawasan aglomerasi perkotaan) dan antar wilayah utamanya aksesibilitas – konektivitas wilayah Pantura – Pansela dan wilayah tengah Jawa Tengah.
 - c) Tingginya kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya fasilitas perlengkapan jalan di ruas Jalan Provinsi dan Persilangan Kereta Api.
 - d) Tidak beroperasinya KMC Kartini I yang telah memasuki usia pakai sebagai Kendala dalam penyelenggaraan program pengelolaan pelayaran terkait konektivitas dan keselamatan pelayaran.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi OSS RBA bagi pelaku usaha;

2. Peningkatan kualitas layanan BRT Trans Jateng dalam menjangkau kawasan aglomerasi wilayah di Jawa Tengah;
3. Pelaksanakan FGD dan koordinasi dengan stakeholder terkait mendukung pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis, Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait forum lalu lintas dan angkutan Jalan;
4. Percepatan pelaksanaan Penghapusan aset Kapal Motor KMC kartini;

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022